

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Juni 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**UNIT KERJA** : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
**SUB UNIT KERJA** : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HAMZAH KHOLIFI
2. Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3. NHK : 713702

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	111.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
2. MOTOR, KAWASAKI 100 CC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	21.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	96.291.892
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	478.791.892

**III. HUTANG** Rp. 104.586.170

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 374.205.722

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.